

LAPORAN NOTULA

Penyusunan Indikator Kerangka Logis Score Card Akuntabilitas Sosial

Selasa, 19 Oktober 2021 – Pukul: 09.00-12.00

PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) melalui Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan mengadakan Kegiatan Penyusunan Indikator Kerangka Logis Score Card Akuntabilitas Sosial. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan Kegiatan Penyusunan Bahan Pembelajaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B. Dalam hal ini, Kemendesa PDTT mengundang beberapa narasumber untuk memberikan paparan terkait Akuntabilitas Sosial, salah satunya adalah Sekretariat Open Government Indonesia.

TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Kerangka Logis Score Card Akuntabilitas Sosial dalam Kegiatan Penyusunan Bahan Pembelajaran Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B.

PEMBAHASAN

1. **Bapak Misbah Hasan**, selaku Sekjen Seknas FITRA menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan.
 - Pelaksanaan akuntabilitas sosial menjadi penting karena beberapa hal, yakni: (a) memperkuat pemberdayaan dan peningkatan kapasitas SDM di desa (b) meningkatkan kualitas tata Kelola dan fungsi pemerintahan desa (c) meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan desa (d) mencapai indikator SDGs Desa.
 - Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Seknas FITRA dalam mendukung terciptanya Akuntabilitas Sosial. Setiap tahun, sekitar 2-3 desa di 11 kabupaten didampingi oleh Seknas FITRA.
 - Pertama, Seknas Fitra menjalankan program *Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa)* yang merupakan ruang belajar untuk masyarakat desa mengenai tata Kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsive gender, dan inklusif. Desa dikatakan 'Melek Anggaran' jika ada diskursus publik tematik di tingkat desa (terkait isu pendidikan, kemiskinan, dukcapil, ekonomi, dst), pemerintah desa transparan dan akuntabel, masyarakat terlibat dalam setiap tahap program dari penyusunan hingga pertanggungjawaban, dokumen perencanaan yang berpihak pada kaum rentan, dan regulasi desa yang inovatif. Transparansi ini tidak hanya pada APBDes tapi pada realisasi, bisa menggunakan SID atau baliho di desa.
 - Kedua, Seknas Fitra menjalankan program *Rumah Aspirasi/ Posko Pengaduan BPD* sebagai tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi

warga yang dilakukan oleh BPD dan sekelompok masyarakat desa. Asosiasi BPD tingkat kecamatan dan desa yang akan mengawal aspirasi hingga ditindaklanjuti. Hasil aspirasi dilacak untuk melihat apakah aspirasi ditindaklanjuti misalnya di dokumen RPJMDes/ RKPDes/ peraturan desa untuk layanan dasar.

- Ketiga, Seknas Fitra menjalankan program *Jurnalisme Warga* yang merupakan kegiatan jurnalistik oleh *citizen reporter*. Seknas FITRA bekerja sama dengan Kompas dan Tempo Witness untuk melatih warga membuat berita, mengambil gambar, membuat video, menambah teks pada gambar dan sebagainya. Jurnalisme ini digunakan untuk mengecek apakah aspirasi warga benar-benar ditindaklanjuti. Hasil jurnalisme warga mendapat respon positif, misalnya ketika layanan dasar terkait infrastruktur rusak maka akan direspon pemerintah daerah atau Kementerian PUPR agar dapat segera diperbaiki.
- Keempat, Seknas Fitra menjalankan program *Penilaian Indikator Kinerja Kepala Desa*. Program ini baru dilakukan di dua desa yakni Trenggalek dan Watulimo. Tahun ini, *tools* ini akan dipraktekkan di 11 Kabupaten dampingan Seknas FITRA.
- Terakhir, Seknas Fitra menjalankan program *Maklumat Pelayanan* yang merupakan kesepakatan antara puskesmas dan warga, misalnya penentuan waktu operasional. Selanjutnya, warga bisa datang ke rumah bidan ketika sakit. Kesepakatan disaksikan Kepala Desa, BPD, dan tokoh-tokoh yang ada di desa. Bentuk kesepakatan ini mirip dengan MoU.

2. **Ibu Maharani Wibowo**, selaku perwakilan Sekretariat Open Government Indonesia selanjutnya menyampaikan paparan sebagai berikut:

- Kunci penting dalam akuntabilitas sosial adalah inklusif, yang dimaknai sebagai proses partisipasi dari semua golongan masyarakat baik tanpa memandang usia, status ekonomi, ataupun disabilitas. Semua kelompok masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, implementasi, dan evaluasi dengan mengemukakan pendapatnya.
- Akuntabilitas Sosial menjadi hal yang penting dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan karena akan menghasilkan (1) kebijakan publik yang lebih efektif dan berdampak karena dapat melibatkan semua kelompok masyarakat (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik karena membuka akses bagi masyarakat dalam memberikan masukan, dan (3) mencegah adanya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan adanya pengawasan publik.
- Menurut *International Association for Public Participation*, ada spektrum pelibatan masyarakat dari tahap *inform* hingga *empower*. Pemerintah dapat menggunakan spektrum yang mana saja bisa diambil, bergantung pada arah kebijakan yang ada. Misalnya, ketika program KB baru dikenalkan, maka masyarakat dilibatkan hanya pada tahap *inform*. Namun, ketika program ini sudah *mature*, maka masyarakat dapat *involve* dan *empower* karena saat ini, ibu-ibu di desa bisa memberikan informasi pada ibu-ibu lain terkait KB. Oleh karena

itu, perlu adanya asesmen pengetahuan masyarakat dan *implementor* untuk melihat tahapan strategi ke depannya.

- Menurut Social Accountability Building Blocks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar akuntabilitas sosial berhasil. Pertama, *mobilizing around an entry point* yang mana kita harus melihat *entry point* kita dan melihat strategi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kedua, *building an information on evidence based* yakni mencari dua tipe data (1) *supply side data* misalnya data BPS, Bappenas, Kemendesa untuk melihat sejauh mana pembangunan desa tersebut berjalan dan mana yang perlu diperbaiki (2) *demand side data* misalnya dengan FGD, musrenbangdes, rapat desa untuk melihat apakah data kita sesuai dengan data di lapangan. Ketiga, *going public* adalah memberikan informasi yang kita miliki di berbagai kanal media. Kita bisa membuat kanal diskusi terkait permasalahan desa dan keterbatasannya, sehingga kita bisa menemukan 3 isu prioritas di desa yang ingin diintervensi. Keempat, *rallying support and building coalition* yakni kita harus bisa mengkomunikasikan pada masyarakat untuk melihat hak dan tanggung jawab desa dan pemerintah dan bentuk koalisi yang efektif dengan *stakeholder* lainnya. Terakhir, *advocating and negotiating change* yang seringkali dilupakan pemerintah pusat karena adanya persepsi bahwa program pemerintah yang paling baik dan dapat diterima. Namun, dalam tahap ini, perlu adanya kesempatan perubahan program yang sesuai dengan masyarakat. Akan tetapi, perubahan mungkin sulit dilakukan jika anggaran sudah ditetapkan. Oleh karena itu, sebaiknya semua siklus ini seharusnya dilakukan minimal 2 tahun sebelum tahun anggaran.
- Ada beberapa instrumen penting dalam akuntabilitas sosial. Pertama, pendekatan GESI / GEDSI untuk mempertimbangkan dan memasukkan analisis ketidaksetaraan dan ketidakadilan berbasis gender, status ekonomi, usia, lokasi, etnis, dan bahasa dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan. Kedua, Gender Based Analysis dikembangkan oleh Pemerintah Kanada sebagai *analytic tool* untuk menilai seberapa beragam kelompok perempuan, anak, dan kelompok yang sering tereksklusi dalam kebijakan, program, dan inisiatif. Ketiga, *participatory planning and budgeting* yakni menyediakan mekanisme pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran, analisis, implementasi, tracking dan monitoring, serta evaluasi. Terakhir, adanya kokreasi yang mana ada akses, kesetaraan dan proses menciptakan lingkungan yang setara, dan pelibatan unsur masyarakat sipil untuk menangkap masalah-masalah di lapangan agar kebijakan menjadi tepat sasaran.
- Ada beberapa faktor penentu keberhasilan akuntabilitas sosial (1) Political context dan culture tidak menjadi halangan (2) access to information (3) role of the media (4) civil society capacity (5) state capacity (6) Kokreasi (7) institusionalisasi yakni adanya strategi agar inisiatif akuntabilitas sosial bisa diimplementasikan dan berdampak panjang.

3. **Bapak Bito Wikanto**, selaku Staf Ahli Kementerian Desa PDTT menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - Akuntabilitas sosial adalah konsekuensi logis dari adanya pengawasan dan pelibatan masyarakat di desa. Penerapan akuntabilitas sosial di desa difokuskan pada tahap penyelenggaraan pemerintahan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
 - Strategi penerapan akuntabilitas sosial meliputi: penguatan partisipasi warga desa, pengelolaan tata Kelola pemerintahan desa yang demokratis, penguatan tata Kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial, dan percontohan serta replikasi akuntabilitas sosial.
4. **Ibu Wafa Patria**, dari Komisi Informasi Pusat menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - Akuntabilitas merupakan “kontrak sosial” antara pemerintah dan masyarakat sebagai instrumen dasar dalam mengembangkan prinsip akuntabilitas dari praktik pemerintahan.
 - Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa hadir karena adanya kesamaan prinsip antar UU KIP dengan UU Desa, yakni Prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi.
 - UU Desa dan UU KIP penting sebagai sarana transparansi pengelolaan informasi desa, peningkatan pengetahuan pemerintah desa terkait UU KIP, serta menjawab tantangan pengelolaan dana desa yang menjadi sorotan publik.
 - Publikasi informasi desa dalam PERKI disusun sangat fleksibel yang ditujukan untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Adanya kondisi sosiologis dan geografis yang berbeda, membuat dibutuhkan fleksibilitas dalam menyusun aturan terkait publikasi informasi desa.
5. **Ibu Grace Palayukan**, dari KOMPAK, menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - KOMPAK memiliki fokus dukungan pada Tata Kelola Kecamatan dan Desa dengan melakukan penguatan kecepatan dalam bimbingan pengawasan kepada desa dan memperkuat kecamatan untuk melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan dasar
 - Untuk penguatan Desa, KOMPAK fokus pada peningkatan kapasitas secara mandiri di tingkat desa, dengan dampingan dari fasilitator belajar, penguatan sistem informasi desa, serta memperkuat kapasitas BPD untuk mendorong lahirnya Akuntabilitas sosial yang dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan memperkuat peran kepemimpinan perempuan di desa.
 - KOMPAK juga fokus untuk melakukan perbaikan komunikasi antara warga, pemerintah, dan penyedia layanan dasar dengan melakukan tiga hal pokok: (1) Perbaikan inklusivitas proses perencanaan dan penganggaran; (2) Melakukan *Collaborative Monitoring* (CM) layanan dasar; (3) Penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Pembelajaran yang didapat selama melakukan program-program akuntabilitas sosial adalah:
 1. Praktik akuntabilitas sosial di desa dapat mengatasi kelemahan antarwaktu akuntabilitas politik
 2. Seluruh pemangku kepentingan desa menemukan insentif untuk menjalankan akuntabilitas sosial
 3. Optimalisasi kelembagaan sosial dan saluran yang tersedia
 4. Regulasi penting, namun tanpa pemberdayaan hanya memfasilitasi akuntabilitas vertikal, bukanlah akuntabilitas sosial
 5. Fokus pemberdayaan ialah memunculkan agen perubahan dan memperbaiki pola interaksi, dalam menjalankannya diperlukan adanya katalisator
 6. Fleksibilitas: program akuntabilitas harus fokus pada *outcome* tidak hanya sekedar memenuhi *output*.

KESIMPULAN

Paparan narasumber baik dari Kementerian Desa PDTT, Seknas FITRA, KOMPAK, KIP dan Sekretariat OGI telah memberikan gambaran terkait indikator *score card* yang bisa digunakan dalam akuntabilitas sosial. Komitmen dari pemerintah dalam kerangka penguatan penyelenggaraan akuntabilitas desa dan pembangunan desa guna mencapai suatu tata kelola yang akuntabel dan efektif juga diharapkan dapat terus terlaksana.

DOKUMENTASI

Recording You are viewing Misbah Hasan's screen View Options

SEKNAS SEKRETARIAT NASIONAL FITRA Pusat Kebaikn Masyarakat Nasional

JALAN SEPANJANG 15 KM DARI KRETEK KE KALIGIA BREBES RUSAK

Road repair sepanjang sekitar 15 km dimulai diwilayah Kaligra, Brebes, rusak. Jalan tersebut mengalami kerusakan akibat dari kegiatan Desa Kretek, Desa Pengapungan, Desa Desa Plambanan. Jalan kabupaten yang

SEBAGIAN JALAN KRETEK - KALIGIA BREBES SELESAI DIBETON

Sebagian ruas jalan Kretek - Kaligra, Desa Plambanan, Kecamatan Pengapungan, Kabupaten Brebes, telah dibetoni. Pengumuman jalan tersebut terdapat dari Desa-Adipati Khusus (DAK) tahun anggaran 2021 sebesar Rp10,80

sekar_desa

JEMBATAN GUY LADA - DIAN PRASETYO DI ARIH SEKAR FITRA

RUPA ADU BARU 'JEMBATAN GUY LADA' DI ARIH SEKAR FITRA

Disukai oleh verashinta19 dan 4 lainnya
sekar_desa Jurnalisme Rakyat merupakan satu diantara empat pilar akuntabilitas sosial desa yang dikembangkan oleh @seknasfitra
Tiga pilar lainnya adalah #sekar_desa #sekar_pengaduanasprasi dan #maklumatayonan

Participants: 30

Unmute Start Video Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Participants: Direktorat Pengembangan..., Dewi Resmingayu..., Deni Tasha, Deni Tasha, Lucky_PSPLDPI, Ning Harpud, Ning Harpud

Zoom Meeting

Recording

Misbah Hasan Ning Harpud

Participants: 31

Unmute Start Video Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Windows taskbar: Type here to search, 31°C Cerah, 10:37, 19/10/2021

Zoom Meeting

Recording

View

 Direktorat Pengembangan So...	 Dewi Resmingayu_OGI	 Bito Wikantosa Kemendes...	Lilis Suryani KO... Lilis Suryani KOMPAK	 Misbah Hasan
 Maria_Regina_PPSDM Ke...	 Lucky_PSPLDP	Ning Harpud Ning Harpud	Haifa' Hasna Haifa' Hasna	Kiki Kiki
Sulistyono Sulistyono	Ayu Puspa Karti... Ayu Puspa Kartika_Kemenk...	Pusdatin Pusdatin	Shinta Sulisty... Shinta Sulistiyowati	 Mustakim
 Co-Host PSPD	Abd.Kamil Abd.Kamil	Ibe Karyanto Ibe Karyanto	Basuki Basuki	sudanar pusdati... sudanar pusdatinkpdt
 Hardian Aprianto	 tommy aryanto	Arry_Kompak Arry_Kompak	Wahyu Sigit Rhd Wahyu Sigit Rhd	 Deni Tasha

Unmute Stop Video

Participants 28 Chat Share Screen Record Reactions Apps

Leave

Type here to search

32°C Cerah 11:14 19/10/2021